

# **MENINGKATKAN PERTAHANAN LAUT: KEPEMIMPINAN STRATEGIS DALAM MENINGKATKAN PERTAHANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)**

## **STRENGTHENING SEA DEFENCE: STRATEGIC LEADERSHIP IN INCREASING INDONESIAN ARCHIPELAGIC SEA LANES (ALKI)**

Sean Narahara

UNIVERSITAS PERTAHANAN RI  
(seannara02@gmail.com)

**Abstrak**– Indonesia, salah satu dari 45 negara kepulauan di dunia, memiliki wilayah laut yang luas dan posisi strategis antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan 17.504 pulau dan luas wilayah laut 3,5 juta km<sup>2</sup>, Indonesia memiliki potensi besar dalam pertahanan dan konektivitas maritim. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan jalur transportasi internasional yang vital dan membutuhkan kepemimpinan strategis untuk meningkatkan pertahanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan strategis dalam meningkatkan pertahanan ALKI, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat keamanan maritim dan memastikan kelancaran jalur perdagangan internasional yang melintasi wilayah perairan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, analisis kebijakan maritim, dan evaluasi data sekunder terkait kondisi geografis, luas wilayah, serta dinamika keamanan dan perdagangan di ALKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan strategis yang efektif berperan penting dalam meningkatkan pertahanan ALKI. Identifikasi potensi ancaman, peningkatan kerjasama internasional, dan modernisasi armada laut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Selain itu, pemanfaatan teknologi pengawasan dan peningkatan kapasitas personel keamanan laut juga terbukti krusial dalam menjaga keamanan jalur perdagangan ini. Kepemimpinan strategis yang kuat dan terarah sangat diperlukan untuk meningkatkan pertahanan ALKI. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memastikan keamanan dan kelancaran jalur transportasi internasional, yang pada gilirannya memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat perdagangan global dan meningkatkan pertahanan maritim nasional. Implementasi langkah-langkah tersebut akan memperkuat keamanan maritim, mendukung ekonomi nasional, dan meningkatkan kerjasama internasional.

**Kata Kunci:** Ancaman, ALKI, kepemimpinan strategis, komprehensif, maritim

**Abstract** – Indonesia, one of the 45 archipelagic countries in the world, has extensive maritime territory and a strategic position between the Indian and Pacific oceans. With 17,504 islands and a maritime area of 3.5 million km<sup>2</sup>, Indonesia holds significant potential in maritime defense and connectivity. The Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) are vital international transportation routes requiring strategic leadership to enhance maritime defense. This study aims to analyze strategic leadership in enhancing ALKI's defense and identify necessary measures to strengthen maritime security and ensure the smooth operation of international trade routes traversing Indonesian waters. The research methods include literature review, maritime policy analysis, and evaluation of secondary data related to geographical conditions, area extent, and security and trade dynamics in ALKI. The study's results indicate that effective strategic leadership is crucial in improving ALKI defense. Key measures that need to be implemented include identifying potential threats, enhancing international cooperation, and modernizing the naval fleet. Additionally, using surveillance technology and increasing the capacity of maritime security personnel are vital in maintaining the security of these trade routes. Strong and directed strategic leadership is essential for enhancing ALKI defense. With the right strategy, Indonesia can ensure the security and smooth operation of international transportation routes, strengthening Indonesia's position as a global

*trade hub and enhancing national maritime defense. Implementing these measures will bolster maritime security, support the national economy, and increase international cooperation.*

**Keywords:** Threats, ALKI, strategic leadership, comprehensive, maritime

## Pendahuluan

Dari 195 negara berdaulat di dunia, 45 di antaranya dikategorikan sebagai negara kepulauan (Franklin, 2023). Indonesia, yang termasuk dalam kelompok ini, adalah salah satu negara kepulauan terluas. Selain itu, Indonesia juga berperan penting sebagai jalur utama transportasi internasional. Lautannya, yang merupakan urat nadi penghubung antarpulau, memainkan peran krusial dalam konektivitas nasional dan internasional.

Indonesia, yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, merupakan salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, mencakup total 17.504 pulau dengan luas keseluruhan sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup> (Akbar, 2022).

Wilayah Indonesia terbagi menjadi tiga kategori: lautan yang mencakup sekitar 3,5 juta km<sup>2</sup>, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 2,55 juta km<sup>2</sup>, dan daratan yang hanya sebesar 2,01 juta km<sup>2</sup> (Rahim et al., 2024). Dengan demikian, lautan memainkan peran penting dalam menghubungkan berbagai pulau dan daratan tersebut (Cameron & Quinn,

2005; Osteraker, 1999). Dengan luas total 3,5 juta km<sup>2</sup>, kapal biasa, kapal kargo, atau bahkan kapal dagang dapat melintasi setiap kawasan.

Dengan luasnya lautan yang dimiliki, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maritim terbesar dan makmur. Selain itu, Indonesia memiliki ciri khas kelautan yang unik, di mana lokasi geostrategis perairannya sangat mendukung sebagai jalur transportasi internasional (Bhaskara et al., 2023).

Hal ini menjadi keuntungan bagi Indonesia untuk menjadi negara sentral perdagangan. Potensi ini dapat direalisasikan dengan memanfaatkan jalur transportasi internasional, sehingga kapal-kapal dagang dapat berlabuh dan berpusat di Indonesia.

Indonesia perlu menyediakan sebuah jalur khusus bagi kapal-kapal internasional untuk dapat melintasi wilayah Indonesia melalui jalur tersebut. Jalur tersebut adalah salah satu jalur perdagangan tersibuk yang ada di dunia karena kapal-kapal dagang bahkan kapal perang melintasi jalur khusus tersebut untuk dapat menghemat waktu dan meminimalisir biaya yang diperlukan

untuk berlayar dari suatu titik ke titik yang lain. Jalur khusus tersebut tidak semata-merta disediakan oleh Indonesia, akan tetapi diminta oleh pihak Internasional, dan jalur tersebut dinamakan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

ALKI sendiri memiliki definisi yang jelas di mana Jalur ini adalah alur maritim dan penerbangan, yang digunakan oleh armada asing di kawasan perairan untuk melakukan mobilitas yang damai. Penetapan ALKI dimaksudkan agar transportasi internasional dapat dilakukan secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh wilayah perairan dan ruang udara Indonesia. ALKI diperuntukkan untuk menghubungkan dua laut lepas, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Semua kapal dan pesawat asing yang hendak menuju Utara atau Selatan harus melalui ALKI. Penetapan wilayah ALKI juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Sehingga, penetapan ketiga Zona Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang ada sekarang ini sebagai izin resmi bagi kapal dan pesawat asing untuk melintasi perairan Indonesia adalah cara untuk menyederhanakan wilayah dan akses

masuk dan keluar dari Indonesia (Bitar, 2020; Hidayat, 2019).

Dengan demikian, keamanan perairan dan wilayah udara di atasnya harus dipertahankan dari segala kemungkinan gangguan atau ancaman yang mungkin muncul. Setiap kapal yang menggunakan jalur Zona Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) harus bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan selama pelayarannya, dan perlindungan tersebut adalah tanggung jawab utama pemerintah Indonesia sebagai penyedia jalur pelayaran yang aman.

Nainggolan (2015) juga menyatakan bahwa terdapat tiga jenis Zona Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang telah diatur dan diidentifikasi dari utara ke selatan, yaitu ALKI-I, ALKI-II, dan ALKI-III. Pada ujung selatan, terdapat tiga sub-jenis: ALKI-III A, ALKI-III B, dan ALKI-III C. Jalur ALKI-I merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan berlanjut ke Laut Timur, menghubungkan jalur pelayaran internasional dari Australia Barat dan Afrika ke Laut Timur atau Jepang. ALKI-II menghubungkan jalur pelayaran dari Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok, Laut Flores, menghubungkan jalur pelayaran internasional dari Afrika

ke Asia Tenggara, Taiwan, Tiongkok, dan Jepang, serta dari Australia ke Singapura, Tiongkok, dan Jepang, atau sebaliknya.

Selain itu, tiap-tiap armada, baik itu kapal dagang maupun armada tempur atau kapal perang, semuanya diwajibkan mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang telah dibuat oleh otoritas terkait yang mana dalam hal ini adalah pemerintah negara Republik Indonesia.

Dalam menanggapi hal ini, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2002 mencatatkan beberapa hal yang harus dipatuhi kapal-kapal internasional tersebut, yaitu:

1. Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas melalui jalur laut kepulauan wajib melewati atau terbang di atas jalur laut kepulauan secepat mungkin dengan cara yang lazim, dan hanya diperbolehkan transit langsung secara terus menerus dengan cepat dan tanpa hambatan.
2. Kapal atau pesawat udara asing yang melewati jalur laut kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari 25 (dua puluh lima) mil laut pada salah satu sisi poros jalur laut kepulauan, dengan ketentuan

kapal dan pesawat udara tersebut tidak dapat bergerak atau terbang di sekitarnya. ke pantai tidak lebih dari 10% dari jarak antara titik-titik terdekat dari pulau-pulau yang berbatasan dengan jalur laut kepulauan.

3. Kapal dan pesawat udara asing, saat menggunakan hak lintas melalui alur laut kepulauan, tidak diperbolehkan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga tidak boleh melanggar prinsip-prinsip internasional yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
4. Kapal perang dan pesawat militer asing, apabila melaksanakan hak lintas melalui jalur laut kepulauan, tidak boleh melakukan latihan atau latihan penggunaan senjata apa pun yang menggunakan amunisi.
5. Kecuali dalam keadaan *force majeure* atau bencana, pesawat udara yang melaksanakan hak lintas melalui Jalur Laut Kepulauan tidak boleh mendarat di wilayah Indonesia.

6. Semua kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir, kecuali dalam hal *force majeure* atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah.
7. Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia.

Dengan demikian, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tidak sekadar merepresentasikan fenomena geografis, ini juga merupakan arteri vital yang mendukung keberlangsungan kehidupan dan ekonomi Indonesia. Jalur maritim ini sangat penting untuk perdagangan, komunikasi, dan kemakmuran keseluruhan negara (Buntoro, 2023). Namun, peluang besar ini juga diiringi oleh tantangan signifikan,

yang meliputi pembajakan dan penangkapan ikan secara ilegal.

Seperti yang disampaikan oleh Sartono et al., (2020) dan Yukl dan Supriyanto (2005) yang menyampaikan bahwa terbukanya jalan Zona Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) juga dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara karena berbagai ancaman dan tantangan yang perlu diatasi. Ancaman yang dihadapi mencakup berbagai aspek: (i) penangkapan ikan ilegal, juga dikenal sebagai IUU fishing; (ii) perdagangan gelap meliputi narkoba, obat-obatan terlarang, manusia, dan senjata; (iii) aksi terorisme; (iv) pembajakan serta perompakan maritim; (v) dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrem; (vi) masalah imigrasi ilegal; (vii) keamanan rantai pasokan energi; (viii) ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih; serta (ix) ancaman dari kehadiran perusahaan militer swasta (PMC) yang beroperasi di perairan Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini, yang sering disewa oleh negara-negara untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik mereka, menyediakan layanan dan keahlian militer atau sejenisnya. (Adriyanto, 2017; Soelistya, 2021)

Oleh sebab itu, untuk menavigasi hal-hal yang terjadi di perairan ini dengan sukses, maka kepemimpinan strategis dan pendekatan holistik terhadap keamanan maritim sangatlah dibutuhkan. Adriyanto (2017) dan Soelistya (2021) memaparkan bahwa kepemimpinan strategis merupakan kemampuan memprediksi, memiliki visi dan juga tetap fleksibel, memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategis.

Rasiddin & Sutanto (2021) dan Hanum et al (2023) menunjukkan bahwa kepemimpinan strategis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan organisasi untuk meningkatkan daya saing strategis dan mencapai tujuan yang lebih tinggi dari rata-rata. Efektivitas kepemimpinan strategis diperlukan untuk sukses dalam perumusan dan implementasi strategi. Lebih lanjut, kepemimpinan strategis melibatkan penentuan arah strategis, optimalisasi dan pemeliharaan kompetensi inti, pengembangan sumber daya manusia, pemeliharaan budaya korporat yang efektif, penekanan pada praktik etik, dan penerapan kontrol strategis.

Menentukan arah strategis memerlukan visi dan kemampuan untuk

mengintegrasikannya ke seluruh organisasi. Kompetensi inti merupakan sumber daya dan kemampuan yang berguna sebagai sumber keunggulan kompetitif. Untuk mencapai penggunaan sumber daya dan skala ekonomi yang lebih besar dalam penggunaannya, penting bagi para pemimpin strategis untuk secara aktif mengembangkan, mengeksploitasi dan mempertahankan kompetensi inti, serta mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Unsur terpenting dalam kepemimpinan strategis adalah kemampuan mengembangkan sumber daya manusia (Syafuruddin et al., 2022). Dengan demikian, kepemimpinan strategis sangat diperlukan dalam mengatur dan menghadapi segala tantangan yang hadir di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) karena banyak ancaman yang sangat mengganggu kedamaian negara dan maka dari itu kehadiran seseorang dengan kepemimpinan strategis yang baik sangatlah diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan strategis dalam meningkatkan pertahanan ALKI, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat

keamanan maritim dan memastikan kelancaran jalur perdagangan internasional yang melintasi wilayah perairan Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang diteliti. Pendekatan kualitatif, seperti yang ditekankan oleh Abdussamad (2021), Sugiyono (2010), dan Cohen et al (2002), memberikan fokus pada pengalaman empiris peneliti, yang penting untuk memahami secara mendalam dinamika keamanan maritim di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Selain itu, metode tinjauan pustaka digunakan untuk mengumpulkan data yang valid dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel terdahulu yang relevan. Tinjauan literatur ini membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, mengembangkan ide baru, dan memperkuat dasar teoritis penelitian.

Penggunaan teknik analisis data melibatkan penggunaan data sekunder yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, sebagaimana yang dijelaskan

oleh Onwuegbuzie & Frels (2016) dan Petersen et al (2015). Data sekunder ini digunakan untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang masalah yang diteliti dan untuk mendukung temuan penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kepemimpinan Strategis dalam Pertahanan Maritim Indonesia**

Dalam konteks pertahanan maritim Indonesia, kepemimpinan strategis melibatkan sejumlah aspek yang krusial. Pemimpin strategis harus memiliki visi jangka panjang yang kokoh untuk memperkuat pertahanan maritim negara. Visi ini harus dijabarkan ke dalam misi-misi yang terukur dan jelas, yang dapat membimbing pencapaian tujuan strategis dalam domain pertahanan laut. Proses ini mencerminkan prinsip-prinsip yang dijelaskan oleh Sugiyono (2010) tentang pengembangan misi yang efektif dalam konteks riset kualitatif.

Lebih lanjut, penting bagi pemimpin strategis untuk menyusun perencanaan strategis yang komprehensif untuk pengembangan kemampuan pertahanan maritim. Hal ini mencakup alokasi sumber daya, pengembangan teknologi, dan koordinasi dengan pemangku

kepentingan terkait. Mintzberg et al., (2009) memberikan wawasan tentang berbagai pendekatan dalam merencanakan strategi organisasi. Dalam proses pengambilan keputusan strategis, pemimpin strategis harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menanggapi ancaman dan tantangan di bidang pertahanan maritim. Keputusan semacam itu harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek, sebagaimana yang ditegaskan oleh Kotter (2010) dalam konsep pengambilan keputusan yang berorientasi pada transformasi organisasi. Selain itu, kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi seluruh komponen pertahanan maritim juga menjadi kunci dalam kepemimpinan strategis.

Gaya efektif kepemimpinan transformasional yang dapat mendorong inovasi, adaptasi, dan peningkatan kinerja organisasi merupakan hal yang esensial, sesuai dengan konsep yang dibahas oleh Mintzberg et al (2009) dalam kaitannya dengan pemimpin yang memimpin perubahan.

### **Strategi Kebijakan Publik dan Kepemimpinan Strategis dalam Pertahanan Maritim Indonesia**

Kebijakan publik yang mendukung anggaran yang memadai untuk pertahanan maritim akan meningkatkan kemampuan dan kesiapan alutsista, serta infrastruktur pendukung. Kebijakan yang mendorong investasi dan inovasi teknologi pertahanan maritim akan meningkatkan daya saing dan kemandirian industri pertahanan laut (Rohmad & Susilo, 2022).

Selanjutnya, kebijakan publik yang memperkuat koordinasi antara sektor pertahanan, keamanan, dan ekonomi maritim akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pertahanan maritim. Kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang pertahanan maritim juga akan meningkatkan profesionalisme dan kualitas personel. Terakhir, kebijakan publik yang mendorong diplomasi dan kerja sama internasional di bidang pertahanan maritim akan memperkuat posisi Indonesia di percaturan global.

Perlindungan jalur laut kepulauan Indonesia mempunyai peranan penting dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan pembangunan ekonomi negara. Dalam konteks ini, kepemimpinan strategis mempunyai dampak yang signifikan. Kepemimpinan strategis yang cermat dan efektif sangat penting untuk



mengelola sumber daya, merancang kebijakan pertahanan, dan merespons dinamika kompleks yang terjadi di wilayah perairan Indonesia (Sarjito et al., 2023). Salah satu aspek kunci dari kepemimpinan strategis pertahanan jalur laut adalah pemahaman menyeluruh tentang geografi dan dinamika wilayah perairan Indonesia. Para pemimpin strategis harus memiliki pengetahuan mendalam tentang ciri-ciri geografis ini untuk merancang strategi pertahanan yang efektif.

Kepemimpinan strategis juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi. TNI Angkatan Laut harus dibekali personel yang mumpuni dan teknologi canggih untuk memantau dan melindungi jalur laut kepulauan. Para pemimpin strategis mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa personel angkatan laut dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks yang dapat timbul ketika melindungi jalur laut. Selain itu, diplomasi juga memainkan peran penting dalam kepemimpinan strategis dalam melindungi jalur laut. Negosiasi yang bijaksana dan hubungan luar negeri yang kuat dapat membantu mengatasi potensi konflik dan

memperkuat kerja sama dengan negara tetangga. Para pemimpin strategis harus memiliki kemampuan diplomasi yang baik untuk memastikan kepentingan Indonesia diperairan tersebut terlindungi dengan baik.

Pentingnya kelestarian lingkungan juga harus menjadi inti kepemimpinan strategis dalam melindungi jalur laut. Para pemimpin strategis harus mengembangkan kebijakan yang mendukung konservasi lautan dan lingkungan laut. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan tetapi juga memastikan perekonomian negara dapat terus tumbuh melalui sektor kelautan dan perikanan. Kepemimpinan strategis juga memerlukan kesiapan menghadapi tantangan baru, termasuk ancaman unik seperti perubahan iklim dan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia dan narkoba. Para pemimpin strategis harus secara proaktif mengidentifikasi potensi ancaman tersebut dan mengembangkan strategi untuk melindungi jalur pelayaran kepulauan dari berbagai risiko.

## **Kesimpulan, Rekomendasi, dan Pembatasan**

Kepemimpinan strategis sangat penting untuk melindungi jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), karena merupakan salah satu wilayah strategis yang sangat rawan terhadap berbagai ancaman. Kepemimpinan yang efektif harus mampu memahami dan mengelola aspek-aspek penting seperti geografi maritim Indonesia, sumber daya manusia, dan teknologi. Pemimpin strategis juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan diplomasi serta mendukung kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, kepemimpinan strategis yang kuat dan efektif akan menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan stabilitas jalur maritim nusantara.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu perlunya investasi dalam pendidikan dan pelatihan pemimpin strategis di bidang maritim untuk pengetahuan mendalam tentang geografi maritim Indonesia. Pengembangan dan implementasi teknologi canggih untuk pemantauan dan perlindungan jalur laut sangat penting. Diplomasi maritim yang kuat harus didorong untuk membangun hubungan baik dengan negara tetangga dan mengatasi konflik. Kebijakan yang mendukung kemajuan ekonomi dan

lingkungan harus diterapkan untuk pembangunan berkelanjutan. Terakhir, kesiapan menghadapi tantangan baru seperti perubahan iklim dan kejahatan transnasional harus ditingkatkan melalui strategi proaktif dan adaptif.

Penelitian ini memiliki beberapa pembatasan. Pertama, data yang digunakan sebagian besar berasal dari sumber sekunder, sehingga mungkin tidak mencakup semua aspek yang relevan. Kedua, penelitian ini berfokus pada teori dan konsep kepemimpinan strategis tanpa studi lapangan mendalam. Ketiga, implementasi rekomendasi memerlukan dukungan politik dan anggaran besar, yang bisa menjadi kendala jangka pendek. Keempat, perubahan kebijakan dan dinamika global yang cepat dapat mempengaruhi relevansi strategi yang dirumuskan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan studi lapangan dan data primer untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif tentang efektivitas kepemimpinan strategis dalam pertahanan maritim Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rappana (ed.); 1st ed.).

- Syakir Media Press.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=vDDxuXZ3P5&sig=DmV9OwVt4ZoLHuyxGLYapnUgjPs&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&ots=vDDxuXZ3P5&sig=DmV9OwVt4ZoLHuyxGLYapnUgjPs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Adriyanto, A. N. M. (2017). Pengaruh Lingkungan Kerja, Kesejahteraan, Dan Kepemimpinan Komandan Kri Terhadap Motivasi Kerja Prajurit Pengawak Kri Di Satkor Koarmatim the. *Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 3(1), 1–18.  
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/download/56/25>
- Akbar, I. (2022). Literature Review Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Untuk Sustainable Development Goals (Sdgs). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(1).  
<https://jurnal.uns.ac.id/jsei/article/view/70930/39317>
- Bhaskara, M. S., Suwarno, P., Adriyanto, A., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Sukendro, A. (2023). Urgensi Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Meminimalisir Konflik Horizontal di Laut China Selatan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 222–233.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4758>
- Bitar, A. (2020). *Bedouin Visual Leadership in the Middle East* (1st ed.). Springer International Publishing.  
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-57397-3>
- Buntoro, K. (2023). *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia* (1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.  
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=D-LeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Jalur+ALKI+ini+sangat+penting+unt>
- uk+perdagangan,+komunikasi,+dan+kemakmuran+keseluruhan+negara&ots=XpooowPLjLL&sig=K96e\_Rm8xYZD5Y-WXsdPpOo7wxQ&redir\_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2005). *Diagnosing and Changing Organizational Culture* (Revised Ed). John Wiley & Sons, Ltd.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2002). *Research Methods in Education* (5th ed.). Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9780203224342>
- Franklin, G. K. (2023, December 7). *List of Countries by Number of Islands - ListFist.com*. ListFist.  
<https://listfist.com/list-of-countries-by-number-of-islands>
- Hanum, G. K., Andriani, N., Pattiran, M., Idie, D., & Susilowati, E. M. (2023). Kepemimpinan Strategis Dan Kinerja Organisasi: Sebuah Meta-Analisis. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 158–166.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.24055>
- Hidayat, A. S. (2019). Implementasi Strategi Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Dalam Mendukung Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 313.  
<https://doi.org/10.22146/jkn.49528>
- Kotter, J. P. (2010). *Leading Change: Why Transformation Efforts Fail*. Harvard Business School Publishing India Pvt. Limited.  
<https://books.google.co.id/books?id=DlnckQEACAAJ>
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2009). *Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management* (2nd ed., Vol. 1998). FT

- Press.  
[https://www.researchgate.net/publication/259760377\\_Strategy\\_Safari\\_A\\_Guided\\_Tour\\_Through\\_The\\_Wilds\\_of\\_Strategic\\_Management](https://www.researchgate.net/publication/259760377_Strategy_Safari_A_Guided_Tour_Through_The_Wilds_of_Strategic_Management)
- Nainggolan, P. P. (2015). Indonesia Dan Ancaman Keamanan Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Kajian*, 20(3), 187–188.  
<https://doi.org/10.22212/kajian.v20i3.624>
- Onwuegbuzie, A. J., & Frels, R. (2016). *Seven Steps to a Comprehensive Literature Review : A Multimodal and Cultural Approach*. SAGE Publications Ltd.  
<http://digital.casalini.it/9781473944138>
- Osteraker, M. C. (1999). Measuring motivation in a learning organization. *Journal of Workplace Learning*, 11(2), 73–77.  
<https://doi.org/10.1108/13665629910260798>
- Petersen, K., Vakkalanka, S., & Kuzniarz, L. (2015). Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. *Information and Software Technology*, 64, 1–18.  
<https://doi.org/10.1016/j.infsof.2015.03.007>
- Rahim, A., Hastuti, D. R. D., & Malik, A. (2024). *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia* (M. Nashrudin (ed.); 1st ed.). Penerbit NEM.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=niP-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Wilayah+Indonesia+++terbagi+menjadi+tiga+kategori:+lautan+yang+mencakup+sekitar+3,5+juta+km2,+Zona+Ekonomi+Eksklusif+\(ZEE\)+sekitar+2,55+juta+km2,+dan+daratan+yang+nya+sebesar+2,01+juta+km2&ots=hpszVYPbHg&sig=dAAAFNyxU4rdFcOfs1ZSfWdUzhU&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=niP-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Wilayah+Indonesia+++terbagi+menjadi+tiga+kategori:+lautan+yang+mencakup+sekitar+3,5+juta+km2,+Zona+Ekonomi+Eksklusif+(ZEE)+sekitar+2,55+juta+km2,+dan+daratan+yang+nya+sebesar+2,01+juta+km2&ots=hpszVYPbHg&sig=dAAAFNyxU4rdFcOfs1ZSfWdUzhU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Rasiddin, L., & Sutanto, R. (2021). Strategi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Pengamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 7(3), 220–231.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33172/spl.v7i3.861>
- Rohmad, R., & Susilo, E. (2022). Kemandirian Industri Pertahanan dalam Mewujudkan Investasi Pertahanan. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(9), 3870–3876.  
<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.985>
- Sarjito, I. A., Duarte, E. P., & Sos, S. (2023). *Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global* (A. A. B. Perwita (ed.); 1st ed.). Indonesia Emas Group.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=s1vXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Geopolitik+dan+Geostrategi+Pertahanan:+Tantangan+Keamanan+Global&ots=jF1VmXtzUX&sig=Xow-sVVpioyFa8M9RsEHQuFZjYc&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Geopolitik+dan+GEOstrategi+Pertahanan%3A+Ta](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=s1vXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Geopolitik+dan+Geostrategi+Pertahanan:+Tantangan+Keamanan+Global&ots=jF1VmXtzUX&sig=Xow-sVVpioyFa8M9RsEHQuFZjYc&redir_esc=y#v=onepage&q=Geopolitik+dan+GEOstrategi+Pertahanan%3A+Ta)
- Sartono, Yudho, L., & Prakoso. (2020). Impresi dan Otoritas Pemerintah dalam Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Strategi Pertahanan Laut*, 6(3), 231–256.  
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/download/639/601>
- Soelistya, D. (2021). *Buku Ajar: Kepemimpinan Strategis* (R. Janata (ed.); 1st ed.). Nizamia Learning Center.  
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=MG6BEAAAQBAJ&oi=fn>

d&pg=PP1&dq=kepemimpinan+strategis+merupakan+kemampuan+memprediksi,+memiliki+visi+dan+juga+tetap+fleksibel,+memberdayakan+orang+lain+untuk+menciptakan+perubahan+strategis&ots=ebC-Bf5uCj&sig=3

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syafruddin, S. E., Periansya, S. E., Farida, E. A., Nanang Tawaf, S. T., Palupi, F. H., St, S., Butarbutar, D. J. A., SE, S., & Satriadi, S. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV Rey Media Grafika.

Yukl, G., & Supriyanto, B. (2005). *Kepemimpinan dalam Organisasi* (E. Tanya (ed.); 5th ed.). Indeks.